

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
S O E H A R T O

DI DEPAN SIDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
15 AGUSTUS 1981

(PIDATO DAN LAMPIRAN)

DEPARTEMEN PENERANGAN RI
1981



*Presiden Republik Indonesia
Soeharto*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati;

Para hadirin yang saya muliakan;

Esok lusa, pada tanggal 17 Agustus, kita akan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kita.

Besok lusa akan genap 36 tahun Republik Indonesia yang tercinta ini tegak berdiri. Setiap kali kita memperingati hari yang paling bersejarah bagi kita itu, maka kita akan melakukannya dalam suasana batin yang sekhidmat-khidmatnya.

Sebagai bangsa yang merdeka kembali dari penjajahan yang kejam, yang menindas jiwa raga kita selama ratusan tahun, maka kita menghargai hidup dalam alam kemerdekaan ini lebih dari apa pun lainnya.

Kita merdeka kembali karena kita telah berjuang dengan memberi segala pengorbanan yang diperlukan. Perjuangan kita ibarat gelombang yang sambung menyambung dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, yang akhirnya menjadi kekuatan dahsyat yang mengakhiri kekuasaan penjajahan di tahun '45. Memang, kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan seluruh rakyat. Karena itu Republik Indonesia ini adalah milik seluruh rakyat, milik semua golongan, milik segala lapisan. Sama sekali bukan milik satu dua orang, bukan milik salah satu kelompok. Juga bukan milik mereka yang paling berjasa sekalipun.

Negara ini adalah negara persatuan dari kita semua. Negara ini akan Jaya, maju, sejahtera dan terhormat apabila kita semua terus memelihara dan memperkokoh persatuan itu! Tekad bersatu padu ini lah yang harus selalu kita perbaharui, setiap kali kita memperingati Hari Kemerdekaan.

Saudara-saudara;

Kali ini peringatan Hari Kemerdekaan itu masih berlangsung dalam bulan Syawal, yakni bulan yang penuh dengan rasa bahagia dan silaturahmi bagi bahagian terbesar bangsa kita. Dalam peringatan kali ini masih terasa suasana Lebaran bagi umat Islam.

Karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini, untuk secara pribadi menyampaikan Selamat Hari Raya Idulfitri kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat ini. Juga --dari mimbar ini-- kepada seluruh kaum muslimin Indonesia di mana pun Saudara berada. Sebagai manusia biasa, saya tentu tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan manusiawi. Untuk itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Marilah kita pada peringatan hari yang paling bersejarah ini menempatkan diri sebagai pejuang-pejuang dan pembangun-pembangun Republik tercinta ini, yang ingin ber dialog dengan sejarah bangsanya sendiri. Marilah kita bertanya : sudah sampai di manakah perjalanan sejarah yang kita tempuh saat ini dan ke arah mana kita harus melangkah. Dan marilah kita bertanya kepada hati nurani kita : apakah yang telah kita darmabaktikan kepada bangsa dan negara ini.

Ya, marilah kita ber dialog dengan diri kita sendiri sebagai bangsa yang membangun.

Marilah kita lihat tempat bangsa kita tegak sekarang ini dalam ukuran-ukuran sejarah. Hal ini penting kita lakukan, sebab jika kita mengukur keadaan sekarang hanya dan sudut keadaan kita masing-masing maka kita akan kehilangan pandangan mengenai kedudukan bangsa kita ini dalam kerangka sejarah. Karena itu saya katakan tadi, marilah kita pada peringatan hari bersejarah ini mengadakan dialog pada diri kita sendiri sebagai bangsa.

Marilah kita sejenak melihat ke belakang untuk merenungkan kembali pengalaman kita bersama sejak Kemerdekaan 36 tahun yang lalu. Dan sekaligus marilah kita juga memandangi ke depan, melihat tantangan dan tugas besar kita di masa datang.

Renungan ke belakang dan sekaligus pandangan ke depan itu bertambah penting, karena kita telah mengalami kurun waktu stabilitas nasional dan laju gerak pembangunan dalam kurun waktu yang paling lama sejak Proklamasi Kemerdekaan, yaitu sekitar satu setengah dasawarsa. Stabilitas nasional dan laju pembangunan dalam kurun waktu yang cukup lama itu sendiri telah merupakan hasil yang besar.

Dalam pada itu kita merasakan perlunya kita memperdalam, memperluas, memperkaya dan menyegarkan pandangan-pandangan kita mengenai masa depan seperti yang kita idam-idamkan mengenai masyarakat kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45. Dengan demikian, maka di satu pihak, kita melihat keadaan sekarang sebagai hasil perjuangan masa lampau. Dan pada lain pihak, kita melihat keadaan sekarang ini secara kritis untuk kita kembangkan secara kreatif menuju pandangan dan idam-idaman mengenai masa depan. Dengan demikian, di samping rasa syukur dan bangga atas hasil-hasil yang kita capai, maka kita juga membuka diri terhadap pembaharuan-pembaharuan yang memang kita perlukan untuk memajukan masyarakat kita. Jangan kita lupakan, bahwa pembaharuan-pembaharuan ini justru merupakan sifat hakiki dari Orde Baru, yang memang bertekad untuk terus memperbaharui diri.

Melihat ke depan dengan pandangan yang kita perdalam, kita perluas, kita perkaya dan kita segarkan, kita menyadari bahwa kita menghadapi tantangan dan tugas yang lebih besar lagi di masa depan itu.

Sejarah bangsa-bangsa memang membuktikan, bahwa untuk mencapai hal-hal yang besar seperti pembangunan diperlukan usaha yang tekun selama puluhan tahun. Malahan ada yang baru dapat mencapai nya setelah beberapa generasi.

Hanya bangsa yang mampu menjamin kesinambungan, peningkatan dan pembaharuan secara terus menerus disertai dengan introspeksi dan koreksi yang diperlukan, akan dapat mencapai hal-hal besar dalam sejarahnya! Dan kita bertekad mencapai hal-hal yang besar dalam sejarah demi kemajuan, kesejahteraan, keadilan dan kejayaan Indonesia.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Dengan sikap itu, marilah kita gali kembali pengalaman-pengalaman sejarah kita.

Dalam hubungan ini saya ingin mengingatkan apa yang seringkali saya katakan, bahwa pembangunan bangsa merupakan rangkaian gerak perubahan menuju kemajuan. Jangan pula dilupakan, bahwa sejak kita Menegakkan Orde Baru maka kita telah mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala lapangan --baik di lapangan politik, ekonomi maupun sosial budaya-- dengan tujuan agar kita dapat membangun masyarakat yang maju tetapi tetap berdasarkan Pancasila, berdasarkan kepribadian sendiri.

Sejak semula kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan bangsa, pembangunan di segala bidang, bukan pembangunan dalam satu bidang, hanya pembangunan di bidang ekonomi saja.

Marilah kita mengingat kembali perjalanan Orde Baru sejak kelahirannya 15 tahun yang lalu sampai sekarang.

Sebelum kita Menegakkan Orde Baru di tahun '66, maka selama 20 tahun sesudah Proklamasi Kemerdekaan kita mengalami kurun waktu Perang Kemerdekaan, yang syukur alhamdulillah dapat kita selesaikan dengan baik, sehingga berakhir dengan pengakuan kemerdekaan kita oleh dunia internasional pada akhir tahun '49. Kemudian setelah itu sejak tahun '50, kita dilanda oleh berbagai pergolakan bersenjata dan pergolakan politik, yang merupakan ancaman bahaya terhadap negara Proklamasi kita yang berdasarkan Pancasila.

Akibat dari pergolakan yang terus menerus selama dua dasawarsa itu dengan puncak malapetaka peristiwa G-30-S/PKI,

adalah kemunduran dan kemerosotan di berbagai bidang, baik di bidang politik, sosial dan terutama di bidang ekonomi.

Tetapi pengalaman selama kurun waktu 20 tahun itu juga telah menghasilkan modal yang sangat berharga bagi kehidupan kita selanjutnya. Ialah : kesadaran mengenai mutlaknya persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila.

Seperti juga dialami oleh beberapa bangsa yang lain, maka kurun waktu perang dan pergolakan itu rupanya harus juga kita lalui sebelum kita dapat memasuki jaman pembangunan.

Dengan demikian, meskipun kita harus mengadakan koreksi total terhadap masa lampau agar kita memiliki kemantapan dan kekuatan baru untuk membangun, namun pembangunan yang kita jalankan tidak berdiri sendiri terlepas dari hasil-hasil perjuangan sebelumnya, melainkan justru merupakan kelanjutan dari perjuangan yang kita jalankan selama Perang Kemerdekaan dan masa-masa sesudah itu.

Melalui pembangunan itu lah kita justru bertekad untuk mewujudkan cita-cita besar yang telah menggerakkan perjuangan kita dahulu.

Seperti telah saya singgung tadi, waktu kita memasuki jaman pembangunan satu setengah dasawarsa yang lalu, tubuh bangsa kita menderita berbagai luka yang ditinggalkan oleh pergolakan-pergolakan dan pertentangan-pertentangan yang berpangkal pada perbedaan pandangan mengenai dasar negara.

Dengan lahirnya Orde Baru, kita memiliki lagi kesepakatan nasional yang menjadi benteng penahan bagi timbulnya kembali persoalan mengenai dasar negara.

Jelasnya, kita memperbaharui tekad untuk mempertahankan dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45.

Pengamanan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45

iniilah yang merupakan kunci terpokok bagi kelangsungan hidup, keselamatan, kesejahteraan dan kejayaan bangsa kita.

Ketika pada tahun '66 kita semua bertekad untuk Menegakkan Orde Baru maka tekad kita adalah meluruskan kembali perjalanan kita sebagai bangsa pada kemurnian cita-cita Kemerdekaan, dengan jalan mengadakan koreksi terhadap kekeliruan-kekeliruan kita di masa sebelumnya. Setia kepada cita-cita Kemerdekaan tidak dapat lain berarti setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45 berarti membulatkan tekad untuk menegakkan demokrasi, konstitusi dan hukum. Ini merupakan tekad bulat kita yang tidak tergoyahkan.

Tekad inilah yang melahirkan konsensus nasional pada tahun '66, ialah :

- Pertama : tekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45 secara murni dan konsekwen;
- kedua : tekad tidak merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45 itu;
- ketiga : dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45 melaksanakan pembangunan sebagai pengisian kemerdekaan.

Kita bertekad demikian karena kita telah berbulat hati agar pemberontakan G-30-S/PKI benar-benar merupakan bencana terakhir yang kita alami dari serentetan pergolakan politik dan pergolakan bersenjata yang terjadi sebelumnya, yang bersumber pada persoalan yang belum dianggap selesai oleh sebahagian di antara kita mengenai dasar negara. Sebagai bangsa yang selalu ingin belajar dari pengalaman dan sejarahnya sendiri, kita tidak perlu menutup-nutupi kenyataan, bahwa --seperti saya katakan

tadi-- bahaya terhadap Pancasila itu memang ada dari pandangan-pandangan ekstrim kiri maupun kanan. Dan sampai sekarang pun kita belum dapat mengatakan bahwa bahaya terhadap Pancasila itu sudah tidak ada lagi.

Karena Orde Baru menghendaki pembinaan bangsa, secara tertib, dengan melaksanakan kehidupan yang demokratis dan konstitusional, maka kita harus melaksanakan pembinaan dan pembangunan kehidupan politik berlandaskan demokrasi dan konstitusi dan sekaligus juga mengadakan langkah-langkah usaha pengamanan konstitusional.

Itulah sebabnya, maka sejak kelahirannya Orde Baru mengambil sikap yang teguh untuk menyalurkan segala kehendak dan kemauan rakyat, termasuk juga tindakan-tindakan korektif yang perlu diambil terhadap penyelewengan-penyelewengan di waktu-waktu sebelumnya, melalui lembaga konstitusional yang berwenang ialah Sidang-sidang Umum dan Sidang Istimewa MPR(S) waktu itu. Melalui Sidang Umum MPRS tahun 1966, Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 dan Sidang Umum MPRS tahun 1968 lahir lah keputusan-keputusan rakyat yang merintis jalan ke arah pembangunan di segala bidang yang kita laksanakan dan kita nikmati sekarang ini, baik pembangunan di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial-budaya maupun hankam.

Memang Sidang-sidang MPRS waktu itu belum dapat menghasilkan GBHN secara bulat seperti yang dihasilkan oleh Sidang MPR tahun '73 dan '78, karena waktu dan kondisi saat itu memang belum memungkinkan. Tetapi Sidang Umum MPRS tahun '68 telah berhasil melaksanakan tugasnya memilih Presiden/Mandataris dengan memberikan tugas kepada Presiden/Mandataris yang baru diangkat waktu itu, antara lain untuk :

- 1) melaksanakan pemilihan umum selambat-lambatnya dalam tahun '71 sebagai rangkaian daripada pembangunan dan pembinaan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
- 2) melaksanakan pembangunan berdasarkan pola pembangunan lima tahun.

Dengan Putusan-Putusan Sidang Umum MPRS tahun '68 itulah --di samping keputusan-keputusan Sidang MPRS sebelumnya-- sebenarnya bangsa kita mempunyai landasan yang kokoh untuk bergerak maju, yang benar-benar berlandaskan kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45. Sejak itulah pula bangsa kita mulai mempunyai kesempatan untuk melaksanakan pembangunan, baik pembangunan di bidang politik --pembangunan politik demokrasi Pancasila-- dan pembangunan ekonomi --demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila--.

Sejak itulah sesungguhnya kita berkesempatan untuk :

- mengkonsolidasi dan membangun aparatur sebagai pelaksana-pelaksana pembangunan;
- menyusun dan membangun kelembagaan negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar;
- membentuk berbagai undang-undang, seperti Undang-undang Pemilihan Umum, Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-undang Pemerintahan Daerah dan sebagainya, sebagai sarana hukum untuk menegakkan dan membangun kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45;

- menyusun rencana pembangunan yang lebih terarah, dimulai dengan REPELITA I, sebagai landasan awal rentetan pembangunan lima tahunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan jangka panjang, menuju kepada tercapainya cita-cita nasional.

Sekarang, itu semua sudah kita hasilkan dan kita miliki. Itulah yang secara maksimal dapat kita capai dalam tahapan waktu itu dan dapat kita pakai sampai sekarang. Ambillah sebagai contoh : Undang-undang tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam RUU Pemilu yang diajukan oleh Pemerintah waktu itu memang termuat gagasan pemilihan umum dengan sistem distrik. Tetapi kondisi dan konstelasi politik waktu itu ternyata belum dapat menerima sistem pemilihan umum dengan sistem distrik itu. Dengan jalan musyawarah dan mufakat, yang memakan waktu yang lama akhirnya tercapai kesepakatan antara DPR dan Pemerintah, yang mengawinkan gagasan sistem distrik dan sistem proporsional. Itulah sistem pemilihan umum yang berlaku sekarang seperti yang tertuang dalam Undang-undang Pemilihan Umum. Itulah hasil musyawarah dan mufakat sesuai prinsip demokrasi kita.

Demikian pula dengan lembaga pengangkatan sebagian anggota DPR (100 orang) dan MPR (1/3 jumlah anggota), yang merupakan hasil maksimal dan mungkin terbaik yang dapat dicapai waktu itu dalam rangka pelaksanaan dari amanat rakyat, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45.

Lembaga pengangkatan 100 orang anggota DPR dari sejumlah 460 orang anggota DPR dan 1/3 dari 920 anggota MPR sebenarnya tidak dapat di lepaskan dari peranan ABRI dalam

pelaksanaan pemilihan umum khususnya dan dalam kegiatan politik pada umumnya, termasuk peranan ABRI dalam pengamanan dan mempertahankan kelestarian Pancasila.

Adalah kebutuhan dan kenyataan sejarah, bahwa peranan ABRI sejak dilahirkannya dalam tahun 1945 dahulu sangat besar dan bahkan menentukan dalam perjuangan bangsa, baik dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan dahulu, maupun dalam mengkonsolidasi dan mengisi kemerdekaan sekarang ini dengan pembangunan bangsa. Peranan ABRI yang demikian itu jelas tidak ditujukan dan dilandasi motivasi untuk menegakkan negara militer, negara diktator atau sebangsanya, tetapi justru dilandasi oleh pengabdian untuk menegakkan dan mempertahankan negara Proklamasi '45 yang berdasarkan Pancasila. Inilah yang antara lain melandasi sifat dan ciri ABRI yang memiliki Dwi Fungsi : fungsi sebagai alat hankam dan alat sosial politik. Dalam rangka melaksanakan Dwi Fungsinya itu, maka sudah wajarlah bahwa ABRI juga perlu diwakili di dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti MPR dan DPR.

Maka dalam rangka pembahasan RUU Pemilihan Umum dan RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD waktu itu timbullah masalah : apakah ABRI turut dalam pemilihan umum atau tidak. Dan kalau tidak turut dalam pemilihan umum, bagaimana dan berapa jumlah anggota ABRI yang duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan itu.

Berdasarkan berbagai pertimbangan waktu itu dapat dikonsensuskan antara semua pimpinan partai politik/golongan karya dan ABRI bahwa ABRI tidak turut dalam pemilihan umum, tetapi duduk dalam MPR dan DPR melalui pengangkatan oleh Presiden. Mengenai jumlah yang diangkat juga diputuskan melalui konsensus bersama antara semua pimpinan partai/golongan karya

waktu itu dengan saya baik sebagai pimpinan nasional maupun pimpinan ABRI, ialah untuk wakil-wakil ABRI di MPR sebanyak 1/3 dari jumlah anggota MPR sedangkan untuk DPR sebanyak 100 dari jumlah 460 anggota DPR. Berkat kesepakatan antara pimpinan partai politik/golongan karya dan pimpinan ABRI itulah maka akhirnya dapat dihasilkan Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD pada tahun 1969. Kedua Undang-undang tersebut --Undang-undang Pemilihan Umum telah dua kali disempurnakan-- dewasa ini tetap berlaku dan menjadi landasan hukum untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang akan datang dan penyusunan DPR serta MPR yang baru nanti.

Adapun pertimbangan pokok dari jumlah pengangkatan anggota ABRI sebesar 1 /3 jumlah anggota MPR adalah dalam rangka mengadakan pengamanan konstitusional terhadap kemungkinan perubahan Undang-Undang Dasar --dan sudah barang tentu juga kemungkinan mengganti dasar negara Pancasila--berhubung dengan adanya ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar '45. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 anggota dari jumlah anggota MPR harus hadir" dan "Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir". Dengan bahasa yang lebih sederhana, ini berarti bahwa secara konstitusional MPR berhak mengadakan perubahan atas Undang-Undang Dasar '45. Padahal di lain pihak Orde Baru telah bertekad untuk melaksanakan secara murni dan konsekwen Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45, tetapi sekaligus juga tidak ingin mengadakan perubahan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45.

Maka dalam rangka mencari jalan pengamanan konstitusional itulah telah dicapai konsensus, bahwa kepada ABRI disediakan 1/3 jumlah anggota MPR melalui pengangkatan.

ABRI yang telah ber ikrar dalam Saptamarga bahwa : "Sebagai patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara, yang bertanggungjawab dan tidak mengenal menyerah" dapat mengamankan kemungkinan penggunaan Pasal 37 itu dengan jalan tidak menghadiri Sidang MPR. Dengan tidak kehadiran ABRI yang diangkat yang berjumlah 1 /3 anggota itu, MPR masih dimungkinkan untuk bersidang, apabila keseluruhan jumlah anggota sisanya yang 2/3 dapat hadir, meskipun kemungkinan itu sangat kecil. Inilah jalan yang demokratis dan konstitusional yang bijaksana yang telah dapat disepakati bersama oleh pimpinan partai-partai dan golongan karya serta pimpinan ABRI dalam rangka mengamankan kemungkinan dilaksanakannya Pasal 37.

Adapun pengangkatan 100 anggota ABRI untuk duduk di DPR mempunyai landasan pertimbangan yang berbeda; bukan dalam rangka pengamanan penggunaan salah satu pasal daripada Undang-Undang Dasar '45, melainkan sebagai stabilisator dan dinamisator dalam pelaksanaan tugas legislatip dan pengawasan yang merupakan fungsi-fungsi utama dari DPR, demi kelancaran dan kelurusan produk-produk hukum dalam rangka melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Perlu kiranya dijelaskan bahwa dalam ketentuan undang-undang yang berlaku itu anggota-anggota yang diangkat dapat terdiri dari ABRI dan non ABRI.

Sekali lagi, konsensus nasional dengan latar belakang yang demikian itulah yang akhirnya merupakan bahan materi pokok dari Undang-undang Pemilihan Umum yang berlaku sampai

sekarang. Maka sungguh tidak berdasar dan tidak ber alasan, apabila ada anggapan bahwa Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang berlaku sekarang ini tidak demokratis dan bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar '45, karena ada pengangkatan sejumlah 1/3 dari seluruh jumlah anggota MPR. Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD adalah undang-undang yang dibuat sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar '45; oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. Bahkan Undang-undang Pemilihan Umum tersebut telah dua kali disempurnakan berdasarkan amanat MPR, sedangkan materinya telah dilandasi oleh konsensus nasional yang mantap.

Apabila sekarang ada di antara kita dengan motif apapun belum puas dengan undang-undang yang berlaku sekarang ini, sebaiknya mereka itu memperjuangkannya melalui jalur konstitusional; menyalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang dipercayainya yang duduk di MPR hasil pemilihan umum nanti. MPR lah nanti yang akan menggariskan apakah Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD secara prinsipil perlu dirubah, khususnya mengenai lembaga pengangkatan sebanyak 1 /3 anggota MPR itu.

Hanya saja saya ingin mengingatkan latar belakang konsensus yang ada di belakang pengangkatan 1 /3 itu, ialah pengamanan konstitusional dari kemungkinan penggunaan Pasal 37 Undang-Undang Dasar '45. Dalam hubungan inilah maka pagi-pagi saya telah melemparkan gagasan untuk mengadakan mekanisme pengamanan konstitusional yang lain. Seandainya nanti MPR memang menghendaki merobah konsensus yang ada dan mempertimbangkan untuk meniadakan lembaga pengangkatan 1/3 jumlah anggota

MPR itu, maka perlu ditetapkan cara pengamanan yang lain. Cara yang saya pertimbangkan adalah : perlu adanya ketetapan MPR, yang menetapkan bahwa apabila MPR akan menggunakan Pasal 37 Undang-Undang Dasar '45, hendaknya sebelum maksud itu dilaksanakan ditanyakan terlebih dahulu kepada rakyat melalui referendum, setuju atau tidak atas penggunaan Pasal 37 tersebut.

Langkah pengamanan ini dapat dipertanggungjawabkan baik secara konstitusional maupun secara politis, karena perubahan Undang-Undang Dasar merupakan masalah yang sangat prinsipil, sehingga sebelum dilaksanakan oleh MPR (melalui penggunaan Pasal 37 Undang-Undang Dasar), MPR sebagai wakil rakyat minta pandangan terlebih dahulu dari rakyat, pemberi kepercayaan.

Saudara-saudara;

Dengan penjelasan ini sekaligus saya ingin menjernihkan kembali pikiran-pikiran kita mengenai pengangkatan anggota ABRI di MPR dan DPR, dan juga mengenai gagasan saya tentang referendum, yang pernah saya kemukakan dalam berbagai kesempatan.

Duduk persoalan dan tujuan dari pengangkatan 1/3 jumlah anggota MPR itu telah jelas; semuanya itu merupakan langkah-langkah pengamanan demi kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45. Sama sekali tidak merupakan usaha terselubung agar Presiden yang sekarang dapat terus menerus menjadi Presiden Republik Indonesia, seperti yang dituduhkan oleh sementara kalangan di antara kita.

Waktu kita menegakkan Orde Baru kita telah mengoreksi kekeliruan kita dengan mengangkat Presiden seumur hidup. Dengan cara apapun kita tidak ingin lagi mengulangi kekeliruan

yang mencelakakan bangsa kita itu.

Justru agar kita tidak mengulangi kekeliruan-kekeliruan masa lampau itu kita harus setia kepada dasar dan tujuan semula. Ini berarti kita harus selalu setia kepada Pancasila. Setia kepada Pancasila tidak cukup hanya dengan ucapan, melainkan harus kita laksanakan secara nyata.

Untuk melaksanakan Pancasila secara nyata ini, kita juga telah mencapai kemajuan besar dengan telah adanya P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

P4 ini merupakan salah satu hasil besar kita sebagai bangsa. Jika pada tahun '45, pendahulu-pendahulu kita telah mewarisi kita semua dengan Pancasila sebagai dasar negara, maka sejak tahun '78, kita telah memiliki pedoman bersama dalam memahami dan mengamalkan Pancasila itu. Ini berarti bahwa Pancasila akan dapat lebih kita laksanakan secara nyata.

Kita sungguh mempunyai alasan kuat untuk menyatakan bahwa kesepakatan nasional kita mengenai P4 ini merupakan hasil dalam bidang spiritual yang besar dalam usaha mengamalkan dan melestarikan Pancasila. Malahan, sejarah bangsa kita kelak barangkali akan mencatat, bahwa kesepakatan kita mengenai P4 itu merupakan hasil kita dibidang ideologi dan politik yang terpenting sebagai kelanjutan dari keputusan bangsa kita di tahun '45 yang menyatakan Pancasila sebagai dasar negara Republik ini.

Dahulu, meskipun kita telah memiliki dasar negara Pancasila, namun masih saja dipersoalkan dan dipertanyakan apa sebenarnya Pancasila itu, dan masing-masing ingin menafsirkan sendiri untuk kepentingan golongannya sendiri, sehingga kita menjadi terbagi dalam pola-pola pikiran yang ber kotak-kotak.

Sekarang kita tidak mau mempersoalkan lagi, apa Pancasila itu, karena sikap bersama kita sudah jelas; Pancasila sebagai dasar

negara ialah Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar '45 dan yang penjabarannya dalam bentuk hukum dasar yang tertulis seperti yang tertuang dalam keseluruhan pasal-pasal Undang-Undang Dasar '45 beserta penjelasannya. Dan sejak tahun 1978, kita telah menghasilkan kesepakatan bersama, mengenai bagaimana kita dapat melaksanakan Pancasila itu dalam kehidupan kenegaraan maupun kehidupan masyarakat sebaik-baiknya. Kesepakatan itu tidak lain adalah P4 seperti yang ditetapkan dalam Tap MPR No. II/'78.

Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita dapat mudah dan mampu menghayati dan mengamalkan Pancasila itu. Bagaimana kita harus memasyarakatkan P4, agar dalam jangka panjang Pancasila yang merupakan pancaran budaya dan kepribadian bangsa itu benar-benar membudaya dan tercermin dalam praktek kehidupan sehari-hari. Apabila sudah demikian keadaannya nanti, maka kelestarian Pancasila akan terjamin. Sekarang kita sedang berusaha, berjuang keras ke arah keadaan yang demikian itu. Kita sedang terus menggalakkan penataran-penataran P4, Undang-Undang Dasar '45 dan GBHN agar masyarakat luas dan khususnya pegawai negeri mengetahui dan menghayati gagasan-gagasan dasar bangsa kita dan cita-cita kemerdekaan kita, semangat budaya dan kepribadian kita yang berdasarkan Pancasila.

Dalam pada itu, saya perlu mengingatkan kita semua, agar kita tidak lengah dan merasa puas diri. Bahaya terhadap Pancasila tetap masih ada dan dapat datang dari luar maupun dari dalam.

Bahaya dari luar berasal dari ideologi lain atau paham lain yang memang ingin memaksakan ideologi dan paham itu kepada bangsa kita. Bahaya dari dalam dapat datang, jika kita sendiri tidak dengan penuh kesungguhan melaksanakan Pancasila itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bersama kita.

Karena itu saya ingin mengulangi peringatan yang telah dicanangkan oleh Ketetapan MPR No. II Tahun '78, bahwa pengamalan Pancasila harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan kita.

Karena itu pula, jangan lah kita hanya menanyakan apakah orang lain telah melaksanakan atau belum melaksanakan Pancasila itu secara nyata. Melainkan, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah melaksanakan Pancasila itu.

Hanya jika kita masing-masing menjadi benteng Pancasila, maka Pancasila itu akan lestari.

Dengan bekal P4 itu, yang memberi bimbingan kepada kita untuk mengendalikan diri, agar mampu mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan, baik dibidang politik, ekonomi maupun sosial-budaya, maka saya yakin kita akan benar-benar dapat merasakan manfaat dan kenikmatan hidup dalam masyarakat yang telah mendarah-daging Pancasila nya.

Saudara-saudara;

Sekarang kita semua sedang sibuk bebenah diri untuk melaksanakan Pemilu yang LUBER, yang akan kita selenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982.

Pelaksanaan Pemilihan Umum itu bukan saja merupakan ciri penting dari hidup tumbuhnya demokrasi di Indonesia, tetapi juga merupakan tonggak penting dari rangkaian kegiatan konstitusional dalam rangka mekanisme penyusunan kepemimpinan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar '45.

Bagi peserta Pemilu, ialah dua Partai Politik dan Golkar, pelaksanaan Pemilu sungguh merupakan arena juang yang pokok,

karena dalam Pemilihan Umum itulah peserta Pemilu akan ditentukan peranan dan pengaruhnya dalam masyarakat.

Menjelang pemilihan umum kegiatan politik memang akan meningkat. Ini adalah hal yang wajar dan memang merupakan watak dari demokrasi. Namun, kita perlu dan dapat bertindak bijaksana hingga suhu politik yang meningkat tetap dalam batas kendali. Ada perbedaan yang jauh antara meningkatkan kegiatan politik dan memanasnya suhu politik. Adalah tanggung jawab kita semua dan tuntutan bagi kita semua untuk mendewasakan kehidupan politik, agar peningkatan kegiatan politik itu tidak dibarengi oleh memanasnya suhu politik. Sebab, panas nya suhu politik dapat membawa akibat yang akhirnya dapat meretakkan persatuan nasional dan mengganggu lancarnya perputaran roda pembangunan nasional.

Memanasnya suhu politik dapat membawa suasana yang mencekam menjelang pemilihan umum, menekan perasaan dan menggelisahkan. Suasana seperti itu tidak boleh terjadi, karena demokrasi memang bukan sesuatu yang menakutkan !

Seperti pernah saya katakan, pemilihan umum harus menjadi pesta besarnya demokrasi, menjadi kiprahnya demokrasi ! Rakyat harus menyongsong dan melaksanakan pemilihan umum itu dengan perasaan segar dan gembira, karena pada saat itulah kita akan menggunakan hak demokrasi kita yang paling nyata. Kita harus menjadikan pemilihan umum itu sebagai bahagian dari kehidupan demokrasi dan kehidupan politik kita yang wajar dan melegakan dada. Membuat suasana pemilihan umum seperti itu merupakan tugas kita semua : tugas Pemerintah, tugas petugas-petugas pemilihan umum, tugas Partai Politik dan Golongan Karya, tugas pemuka-pemuka masyarakat dan tugas seluruh rakyat. Dan, sekali lagi apabila kita telah menghayati Pancasila, apabila kita mau melaksanakan P4, mampu mengendalikan diri kita

masing-masing, maka tugas itu bukanlah tugas yang terlalu berat.

Karena kita cinta demokrasi, karena kita percaya bahwa bangsa kita akan hidup kokoh dan berbahagia, maka dari mimbar ini saya menyerukan kepada setiap warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya nanti sebaik-baiknya.

Jangan ada di antara kita yang bersikap acuh tak acuh, atau masa bodoh terhadap pemilihan umum itu.

Sikap acuh tak acuh seperti itu menggambarkan rasa tidak bertanggung jawab, tidak berani menghadapi tantangan hari depan. Jika ada orang-orang seperti ini, maka sesungguhnya mereka tidak mau ikut dalam pembangunan bangsa, padahal pembangunan bangsa itulah yang menjadi dambaan Orde Baru.

Dalam pada itu saya juga ingin mengingatkan bahwa Undang-undang Pemilihan Umum juga menentukan tindakan yang dapat diambil terhadap mereka yang dengan sengaja mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan yang diselenggarakan menurut Undang-undang Pemilihan Umum yang berlaku.

Pemerintah dengan LPU-nya akan berusaha sekuat tenaga agar pemilihan umum nanti dapat berjalan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya juga menyerukan kepada semua petugas pemilihan umum, kepada peserta pemilihan umum dan kepada masyarakat pada umumnya agar mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, berdasarkan pada Undang-undang Pemilihan Umum yang berlaku.

Apabila kita benar-benar setia dan menjunjung tinggi kehidupan demokrasi, maka kita, setiap warga negara harus merasa terikat kepada pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum itu, karena Undang-undang Pemilihan Umum itu : adalah produk hukum yang demokratis dan konstitusional.

Saya percaya bahwa rakyat Indonesia, khususnya mereka yang telah berhak memilih akan menggunakan haknya itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian mereka itu telah berpartisipasi dalam menegakkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45.

Demokrasi sejati yang ingin kita tegakkan justru harus kita tegakkan sendiri dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Demokrasi itu sendiri harus mengandung dua unsur penting, ialah kebebasan dan tanggung jawab sekaligus. Tanpa tanggung jawab, maka kebebasan akan menjadi liar dan mencelakakan. Sebaliknya, tanpa kebebasan yang bertanggung jawab akan menjadikan hidup ini serasa mati.

Melalui pemilihan umum yang kita ada kan lima tahun sekali itulah kita menyegarkan kehidupan bangsa. Melalui pemilihan umum itu semua golongan dan semua generasi bangsa kita bersama-sama memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam MPR, DPR dan DPRD. Dan MPR hasil pemilihan umum itu, dalam Sidang Umum MPR nanti akan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang baru. Itu berarti bahwa melalui partisipasi semua golongan dan semua generasi bangsa kita dalam pemilihan umum, kita memberi mandat kepada MPR untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh bangsa ini, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus di perbaharui dan apabila perlu apa yang harus di koreksi untuk masa selanjutnya.

Melalui pemilihan umum yang kita adakan secara berkala itulah perubahan dan pembaharuan kita lakukan secara tertib dan teratur, secara demokratis dan konstitusional, tanpa goncangan-goncangan yang melukai tubuh bangsa kita sendiri. Dan apabila ini semua dapat berjalan dengan berhasil, maka itu berarti bahwa kita telah dapat mencapai hasil dan kemajuan lagi dalam pem-

bangunan bidang politik, dalam rangka mewujudkan demokrasi Pancasila. Di samping itu kita juga akan memiliki landasan yang makin kokoh dalam melanjutkan pembangunan bangsa, yang dewasa ini sedang giat kita lakukan dan telah dapat kita rasakan hasil-hasilnya.

Saudara Ketua, Dewan yang terhormat;

Terlaksananya pemilihan umum jelas berhubungan erat dengan kehidupan kepartaian di Indonesia yang dewasa ini diatur dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, yang menetapkan adanya dua Partai Politik --yaitu PPP dan PDI--, serta Golongan Karya. Kedua Partai Politik dan Golongan Karya itulah yang menurut Undang-undang Pemilu berhak menjadi peserta dalam pemilihan umum, yang telah terlaksana sejak pemilihan umum tahun '77.

Dua Partai Politik dan Golongan Karya yang kita miliki sekarang ini merupakan hasil dari usaha yang memakan waktu yang panjang untuk memperbaharui kehidupan politik kita melalui penyederhanaan kehidupan kepartaian dan kekaryaan seperti yang sejak tahun '66 diamanatkan oleh rakyat, yang tampak jelas dalam ketetapan-ketetapan MPRS maupun MPR hasil pemilihan umum tahun '71. Adanya dua Partai Politik dan satu Golongan Karya, yang telah diatur dan dijamin dalam Undang-undang itu justru merupakan pelaksanaan pula dari pasal 28 Undang-Undang Dasar '45 yang menegaskan, bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Mungkin saja ada di antara kita yang belum puas dengan wadah-wadah politik rakyat yang kita miliki itu. Adalah tugas kita semua sebagai pencinta dan pejuang demokrasi untuk terus

memperbaiki yang telah kita miliki dan kita bangun dengan penuh kesungguhan hati untuk menumbuhkan dan menyegarkan kehidupan demokrasi di negeri ini. Jangan kita terjerumus kembali ke dalam kericuhan nasional seperti yang kita alami dalam jaman puluhan partai, yang jelas tidak dapat menjawab kebutuhan pertumbuhan demokrasi yang sehat dan pembangunan nasional seperti masa-masa pahit yang telah lampau.

Adalah tugas dan tantangan bagi dua Partai Politik dan Golongan Karya untuk terus mengkonsolidasikan diri, mengkonsolidasikan organisasi dan program-programnya, sehingga benar-benar dapat menjadi wadah kegiatan politik bangsa yang sehat, dan sebagai kekuatan sosial politik yang mampu mengemban fungsi utamanya memperjuangkan aspirasi politiknya dalam rangka mencapai cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45. Usaha untuk menumbuhkan partai politik dan golongan karya yang sehat dan menjadi kekuatan politik bangsa yang tangguh, merupakan bagian penting dalam pembangunan bangsa, khususnya di bidang politik.

Sidang Dewan yang terhormat;

Marilah kita sekarang meninjau keadaan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan kita khususnya di bidang ekonomi.

Keadaan ekonomi kita dan pelaksanaan pembangunan dalam tahun terakhir ini sungguh membesarkan hati.

Dengan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, pelaksanaan pembangunan dalam REPELITA III ini telah mencapai hasil-hasil yang mengesankan. Kemajuan-kemajuan itu antara lain ditandai oleh :

- Pertama : stabilitas ekonomi yang cukup terkendali, padahal gejolak inflasi dalam tahun-tahun terakhir ini sedang terjadi di dunia;
- Kedua : laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sedangkan ekonomi dunia dalam keadaan resesi;
- Ketiga : pelaksanaan pemerataan pembangunan makin nyata dapat diusahakan dan makin nyata dapat dirasakan.

Perkembangan ekonomi Indonesia dalam tahun '80 yang sungguh membesarkan hati tersebut mencerminkan hasil yang nyata daripada pelaksanaan pembangunan dalam dasawarsa tujuh puluhan. Dalam pada itu perkembangan ekonomi yang sangat baik dalam tahun '80 itu merupakan modal yang sungguh besar nilainya dalam memasuki dasawarsa delapan puluhan. Oleh karena itu dasawarsa delapan puluhan yang penuh dengan tantangan itu kita hadapi dengan penuh keyakinan akan kemampuan bangsa Indonesia untuk lebih meningkatkan lagi pelaksanaan pembangunan nasional.

Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang pokok-pokok saja mengenai keadaan ekonomi dan laju pembangunan kita itu.

Usaha memantapkan stabilitas ekonomi, khususnya mengendalikan laju inflasi, tetap menjadi salah satu program dan usaha yang sangat penting, karena tanpa stabilitas ekonomi pelaksanaan pembangunan akan mengalami berbagai hambatan. Padahal laju pembangunan itu akan terus berlangsung makin meningkat. Terlebih-lebih dalam waktu sekarang ini, di mana dunia pada umumnya sedang mengalami tekanan-tekanan inflasi yang cukup serius, maka kita perlu waspada dan terus berusaha

agar inflasi yang terjadi di dunia itu jangan sampai turut mendorong laju inflasi di Indonesia.

Berkat usaha-usaha kita dalam meningkatkan produksi dan persediaan (stock) dari berbagai barang dan jasa kebutuhan pokok rakyat yang mantap, maka kita bukan saja berhasil mengendalikan laju inflasi, melainkan selama REPELITA III sampai sekarang ini terdapat penurunan laju inflasi yang cukup menenangkan.

Dalam tahun '79 laju inflasi di Indonesia mencapai 21,8%, dalam tahun '80 laju inflasinya turun menjadi 15,9% dan selama 7 bulan dalam tahun '81 ini --Januari sampai dengan Juli-- laju inflasinya sebesar 5,4%. Angka jauh lebih kecil dibandingkan dengan kurun waktu yang sama dalam tahun-tahun sebelumnya.

Dengan adanya stock barang-barang kebutuhan pokok rakyat yang cukup besar --seperti pangan, sandang dan barang-barang pokok lainnya-- maka kita mengharapkan stabilitas ekonomi dalam tahun '81 dan juga dalam tahun '82 dan seterusnya dapat tetap dijaga kemantapannya.

Dalam pada itu, berdasarkan bahan keterangan yang lebih lengkap serta perhitungan yang lebih terperinci maka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun '80 yang semula diperkirakan sekitar 7% ternyata mencapai 9,6%. Ini merupakan pertumbuhan yang cukup tinggi; lebih tinggi dari pertumbuhan yang kita capai dalam tahun '79 sebesar 5,3%. Lebih-lebih apabila dibandingkan dengan pertumbuhan di negara-negara lain, maka angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun terakhir ini termasuk salah satu yang paling tinggi di dunia. Ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi dunia sedang bergejolak, namun Indonesia bukan saja mampu menghindari akibat-akibat negatif yang

ditimbulkan oleh resesi ekonomi dunia, melainkan justru berhasil meningkatkan pembangunan nasionalnya.

Laju pertumbuhan ekonomi yang sungguh tinggi dalam tahun '80 terutama disebabkan karena pertumbuhan produksi pangan yang sangat tinggi dan pertumbuhan sektor industri yang pesat pula. Dalam tahun '80 produksi beras mencapai 20,2 juta ton, suatu kenaikan sebesar 13,3% dibanding dengan tahun '79. Kenaikan produksi beras dalam tahun '80 ini adalah kenaikan produksi yang tertinggi yang pernah dialami oleh ekonomi Indonesia.

Produksi beras sebesar 20,2 juta ton dalam tahun '80 mungkin akan lebih jelas maknanya apabila kita menengok sebentar ke belakang, mengingat kembali keadaan sepuluh tahun yang lalu. Pada waktu itu dalam tahun '70 produksi beras barulah mencapai 13,1 juta ton. Ini berarti bahwa dalam jangka waktu 10 tahun para petani kita telah menambah produksi beras dengan 7,1 juta ton, suatu kenaikan sebesar lebih dari 50%.

Dewasa ini terdapat tanda-tanda yang kuat bahwa apabila tidak terjadi aral melintang selama tahun '81 ini maka Insya Allah produksi beras akan lebih meningkat lagi menjadi sekitar 21,6 juta ton dalam tahun '81.

Apabila ramalan ini dapat menjadi kenyataan, maka ini berarti bahwa hasil panen tahun '81 nanti telah melampaui angka sasaran produksi beras dalam tahun terakhir REPELITA III, yaitu sebesar 20,6 juta ton.

Peningkatan produksi pertanian, khususnya beras, bagi kita sungguh mempunyai arti yang amat penting. Bukan saja karena pembangunan ekonomi kita memang menitik beratkan pada sektor pertanian, tetapi di samping itu mempunyai arti lain yang sangat penting. Peningkatan produksi pertanian --khususnya

beras-- berarti peningkatan penghasilan petani, karena baik pemasarannya maupun harga jual produksi beras itu dijamin dan dilindungi.

Karena petani merupakan jumlah terbesar rakyat kita, maka hasil pembangunan ini juga menjangkau pemerataan peningkatan penghasilan, salah satu jalur pemerataan yang penting.

Peningkatan produksi beras berarti pula pengurangan kebutuhan impor beras, yang dengan demikian berarti penghematan pengeluaran devisa, sehingga memungkinkan kita lebih banyak menggunakan devisa itu untuk mengimpor barang-barang lain yang kita butuhkan seperti barang-barang modal dan bahan baku.

Peningkatan produksi beras juga berarti membantu pengendalian stabilisasi harga, karena memungkinkan tersedianya beras di pasaran dalam jumlah yang lebih besar. Ini berarti bahwa peningkatan produksi beras ikut memantapkan pengendalian inflasi.

Peningkatan produksi beras juga berarti peningkatan pemerataan pembangunan di pedesaan dan pembangunan daerah, karena peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan petani itu telah berlangsung di wilayah pedesaan, yang meliputi bagian terbesar wilayah Indonesia.

Dengan produksi beras tahun '81 ini yang lebih dari 21 juta ton itu, sebenarnya kita sudah dapat mengatakan bahwa kita telah mulai menginjak tahapan swasembada beras, apabila hanya dihitung dari segi produksi dan konsumsi saja. Karena kita ingin memiliki dan memelihara stock beras yang cukup setiap saat dalam rangka berjaga-jaga dan mengamankan kelangkaan beras bagi daerah-daerah tertentu, dalam waktu-waktu tertentu, dan terutama apabila terjadi bencana alam yang diluar perhitungan manusia, maka kita untuk sementara ini masih perlu mengimpor beras dalam jumlah yang terbatas. Dewasa ini stock

beras kita telah mencapai sekitar 2,5 juta ton, dan kemampuan pengadaan beras dari dalam negeri sendiri terus meningkat. Diperkirakan untuk tahun '81 ini pembelian beras dalam negeri akan dapat mencapai 2 juta ton setara beras, suatu jumlah yang belum pernah tercapai selama ini.

Kenaikan produksi beras yang cukup melonjak dalam dua tahun terakhir itu disebabkan oleh berbagai faktor; baik faktor cuaca yang menguntungkan bagi kegiatan pertanian beras, faktor sarana produksi --seperti bibit, pupuk dan obat-obatan hama-- yang telah mulai lancar dan cukup tersedia, makin luasnya areal sawah yang dapat diintensifikasikan karena makin baiknya pengairan, maupun --dan ini yang saya kira sangat penting-- meningkat dan meluasnya kesadaran petani untuk melaksanakan sistem intensifikasi yang efektif yang dianjurkan oleh Pemerintah, ialah yang terakhir ini sistem intensifikasi khusus atau insus.

Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan hormat saya kepada semua Bapak dan Ibu Tani yang telah dengan sadar mengikuti anjuran dan petunjuk Pemerintah untuk melaksanakan intensifikasi pertanian dengan cara-cara yang terus ditingkatkan, ialah yang sekarang ini kita lakukan dengan sistem Insus tadi. Secara khusus penghargaan juga saya sampaikan kepada para kader tani, pimpinan kontak tani dan para petugas yang berkecimpung dalam usaha meningkatkan produksi pertanian, atas segala jerih payahnya dalam membimbing dan memberikan pelayanan kepada para petani untuk mensukseskan peningkatan produksi beras melalui intensifikasi pertanian.

Namun segera saya perlu mengingatkan agar usaha dan tekad untuk terus menaikkan produksi beras itu tidak kita anggap sudah selesai atau telah merupakan pekerjaan rutin belaka. Bimbingan, penyuluhan, kewaspadaan masih tetap diperlukan.

Bagi mereka yang telah melaksanakan Insus dan telah berhasil meningkatkan produksi agar melanjutkan dan meningkatkan lagi cara kerjanya. Bagi mereka atau daerah-daerah yang belum melaksanakan Insus sedangkan lahan sawahnya memungkinkan, agar untuk musim tanam yang akan datang melaksanakan Insus seperti rekan-rekan petani lainnya.

Menurut data yang ada, belum seluruh tanah persawahan yang telah dilengkapi dengan pengairan teknis melaksanakan intensifikasi dengan baik dan juga baru sebagian yang melaksanakan Insus. Dengan hasil-hasil nyata peningkatan produksi dalam tahun '80 dan '81 ini, maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan Insus untuk daerah persawahan yang telah memenuhi syarat-syarat teknisnya.

Kepada para Gubernur, Bupati, Camat, Lurah dan para pejabat pertanian saya minta untuk terus memberikan perhatian utama, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk berhasilnya pelaksanaannya.

Saudara Pimpinan Dewan yang terhormat;

Di sawing usaha untuk terus meningkatkan produksi beras, kita juga harus terus mengusahakan peningkatan produksi pertanian yang lain seperti palawija, perkebunan, perikanan dan peternakan, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri maupun untuk meningkatkan hasil ekspor kita.

Misalnya mengenai produksi gula : meskipun kita telah berhasil meningkatkan produksi gula selama beberapa tahun terakhir ini, namun karena konsumsi gula juga meningkat cukup tinggi sebagai akibat dari peningkatan kemampuan rakyat, maka dewasa ini kita masih harus mengimpor gula sebanyak beberapa

ratus ribu ton setiap tahun. Oleh karena itu dewasa ini kita sedang berusaha keras untuk meningkatkan lagi produksi gula kita, baik dengan perluasan areal tanaman tebu dan rehabilitasi pabrik-pabrik gula yang ada --yang telah amat tua keadaannya-- maupun dengan mendirikan pabrik-pabrik gula baru dengan membuka areal tanaman tebu yang baru, terutama di luar Jawa.

Kemudian mengenai hasil-hasil perkebunan untuk barang ekspor seperti karet, kelapa sawit, kopi dan lain-lain juga sangat penting kita tingkatkan, baik dengan peremajaan tanaman, maupun dengan membuka areal perkebunan baru, khususnya dengan sistem yang kita kenal dengan Perkebunan Inti.

Meskipun dewasa ini ada kelesuan pasaran dan penurunan harga-harga dari komoditi ekspor di pasaran dunia sebagai akibat dari resesi, sehingga menurunkan penerimaan ekspor kita dari barang-barang tersebut, namun di hari-hari yang akan datang permintaan akan barang-barang tersebut akan tetap besar. Justru karena itu lah maka sekarang adalah saat yang baik untuk melaksanakan perluasan perkebunan yang menghasilkan bahan ekspor yang penting itu.

Dalam pada itu Pemerintah akan terus berusaha mencari jalan untuk mendorong ekspor dari barang-barang bukan minyak bumi dan gas alam, agar harga barang-barang kita mempunyai daya saing yang cukup tinggi di pasaran luar negeri.

Bagi Indonesia, meningkatkan ekspor barang-barang bukan minyak bumi dan gas alam itu adalah mutlak, agar kita tidak tergantung pada hasil ekspor minyak bumi dan gas alam yang dewasa ini merupakan hasil ekspor terbesar, tetapi yang dalam jangka panjang akhirnya akan habis.

Karena itu dalam jangka panjang kemandirian produksi dan ekspor dari sektor pertanian mempunyai arti yang sangat

strategis, di samping dari sektor industri dan pertambangan lainnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 9,6% dalam tahun '80, kecuali disebabkan oleh pertumbuhan produksi pangan yang sangat tinggi, juga didorong oleh pesatnya laju pertumbuhan sektor industri yang mencapai 21% dalam tahun '80. Pertumbuhan industri yang sangat tinggi itu didorong oleh tiga faktor penting, ialah :

1. Meningkatnya produksi pangan yang tinggi, telah meningkatkan daya beli para petani, sehingga meluaskan pasaran barang-barang hasil industri di dalam negeri.
2. Pelaksanaan APBN yang diarahkan secara lebih nyata untuk mengutamakan pembelian barang-barang hasil produksi dalam negeri.
3. Meningkatnya kemampuan hasil industri Indonesia untuk memasuki pasaran dunia, sebagai hasil dari berbagai dorongan yang diberikan oleh Pemerintah.

Laju pertumbuhan sektor industri ini sejalan dengan strategi pembangunan kita, yang ingin menyeimbangkan struktur ekonomi Indonesia antara sektor pertanian dan sektor industri, yang dewasa ini masih berat pada sektor pertanian. Dengan seimbangya struktur ekonomi itu jelas akan dapat memantapkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional pada umumnya.

Pertumbuhan industri yang memadai jelas mempunyai berbagai arti penting. Dengan industri yang meningkat baik jenis dan jumlahnya, maka makin besar jumlah dan jenis barang yang dapat kita hasilkan sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan kita pada luar negeri. Dengan mengurangnya impor barang industri --yang sebagian berupa barang-barang jadi-- akan memperbesar

kemampuan kita untuk mengimpor barang-barang yang belum dapat kita hasilkan sendiri. Pertumbuhan industri juga jelas meningkatkan penghasilan masyarakat dan akan mendorong pertumbuhan industri lebih laju lagi, yang akan memberikan kesempatan dan lapangan kerja makin besar.

Dewasa ini Pemerintah sedang melaksanakan dan mengadakan persiapan-persiapan untuk pembangunan industri dasar, seperti pabrik baja --sebagai perluasan dari pabrik baja Krakatau Steel yang telah ada--, alat-alat angkutan, alat-alat besar, pusat pengecoran dan penempaan baja, pengecoran aluminium Asahan dan lain-lain, baik yang dilakukan oleh Pemerintah sendiri melalui penyertaan modal maupun yang dilakukan oleh swasta.

Di samping itu proyek-proyek di bidang pertambangan seperti proyek alumina di Pulau Bintan, batubara Sawah Lunto dan Bukit Asam serta proyek di bidang prasarana listrik yang cukup besar di Jawa dan di luar Jawa terus dikerjakan agar dapat siap sesuai dengan rencana. Langkah-langkah ini akan merupakan persiapan ancang-ancang dalam memasuki REPELITA IV nanti, yang memungkinkan industri kita mampu menghasilkan mesin-mesin industri sendiri.

Dalam seluruh gerak pembangunan itu --baik yang besar maupun yang kecil, baik yang mempunyai ruang lingkup nasional maupun yang mempunyai ruang lingkup daerah sampai desa, baik yang dikerjakan oleh negara maupun yang dilakukan oleh swasta dan perorangan-- marilah selalu kita isi dengan semangat kebangsaan dan patriotisme.

Marilah kita kobarkan nasionalisme dan patriotisme baru, ialah nasionalisme dan patriotisme dalam jaman pembangunan nasional ini!

Saya pernah mengajak kita semua agar dalam bidang ekonomi kita menjadi "tuan di rumah sendiri". Langkah-langkah ke arah ini pun sedang terjadi dewasa ini. Walaupun kita masih memerlukan modal dan keahlian dari luar, namun tidak sedikit modal dalam negeri yang telah bangkit. Tidak sedikit juga jumlah tenaga-tenaga Indonesia, sebagian malahan tenaga muda, yang kini mampu merancang proyek-proyek besar, mampu mengelola perusahaan yang besar, mampu menguasai teknologi yang makin tinggi dan lain sebagainya.

Dalam membangun proyek-proyek besar yang memerlukan teknologi yang lebih tinggi --seperti pembangunan kilang-kilang minyak dan gas alam, proyek-proyek petro kimia dan pertambangan dan lain sebagainya-- kita selalu mengusahakan agar sebanyak mungkin putera-putera Indonesia ikut serta dalam pekerjaan yang penting. Ini semua merupakan proses alih teknologi, alih keahlian dan alih ketrampilan, yang jelas merupakan syarat penting bagi terwujudnya kekuatan ekonomi nasional yang sebenar-benarnya serta akan makin memperkokoh ketahanan nasional.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Seperti telah kita maklumi bersama, maka dalam melaksanakan pembangunan ekonomi itu tujuan pokok kita adalah untuk makin membuat seluruh rakyat hidup sejahtera lahir dan batinnya.

Ini adalah tujuan jangka panjang yang kita pegang teguh. Strategi ekonomi, politik ekonomi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi kita tetap mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat tadi dengan mengusahakan dan mengutamakan pemerataan

menuju pada terciptanya keadilan sosial. Karena itu saya bantah anggapan seolah-olah dalam pembangunan yang kita laksanakan sekarang ini kita hanya mengejar-ngejar kenaikan GNP semata-mata, atau pembangunan ini hanya tertuju dan menguntungkan segelintir orang saja. Anggapan semacam ini menyesatkan. Dan lebih berbahaya lagi, akan melemahkan semangat kita.

Memang, dewasa ini belum terwujud keadilan sosial yang kita cita-citakan. Masih terdapat perbedaan dan kepincangan sosial. Tetapi juga tidak dapat dipungkiri kenyataan bahwa kesejahteraan rakyat rata-rata dewasa ini jauh lebih baik dari waktu-waktu sebelum kita melaksanakan pembangunan. Dan dari hasil pembangunan serta dari arah kebijaksanaan pembangunan yang dilandaskan kepada GBHN, kita akan bergerak menuju terwujudnya keadilan sosial. Kita dengan sadar dan secara pragmatis melaksanakan demokrasi ekonomi seperti yang ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar '45.

Apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah usaha untuk meletakkan landasan yang kuat agar kita mampu terus tumbuh, dan bersamaan dengan itu kita usahakan agar kesejahteraan rakyat tadi bertambah baik, hingga akhirnya terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saudara-saudara;

Akhir-akhir ini banyak di antara kita yang membicarakan mengenai ekonomi Pancasila. Saya menilai perhatian ke arah pemikiran itu sangat menggembirakan, lebih-lebih karena mulai dibicarakan kembali oleh para cerdik cendekiawan kita. Sebenarnya telah lebih dari tujuh tahun yang lalu, pada peringatan ulang tahun yang ke-25 dari Universitas Gajah Mada, saya telah

mengajak kalangan perguruan tinggi kita untuk secara ilmiah mengadakan pemikiran mengenai pengetrapan Pancasila dalam segala kehidupan bangsa kita. Ajakan itu saya ulangi lagi pada peringatan hari ulang tahun ke-25 Universitas Indonesia pada tahun '75.

Dalam memikirkan ekonomi Pancasila itu kita hendaknya berpangkal dari bumi Indonesia sendiri, yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45. Memikirkan konsep politik, konsep ekonomi dan konsep sosial dengan bertolak dari paham lain di luar Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45 pasti akan membawa kita ke arah kesesatan jalan.

Sudah jelas, bahwa kita semua, terutama Pemerintah terikat dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pembangunan tata ekonomi, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Dan hendaknya kita camkan sedalam-dalamnya : bahwa Pasal 33 tadi tertera dalam judul Bab mengenai Kesejahteraan Sosial!

Ini berarti bahwa kegiatan ekonomi negara dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya harus bertujuan untuk memajukan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Tata ekonomi yang kita cita-citakan haruslah tata ekonomi yang sesuai dengan pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar; dan pasal 33 ini memuat dasar demokrasi ekonomi yang antara lain menyebutkan bahwa kemakmuran masyarakat lah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bahwa bangun perusahaan yang sesuai (dalam demokrasi ekonomi) adalah Koperasi.

Karena kita bertekad untuk mewujudkan perekonomian yang ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar, maka adalah panggilan bagi kita semua untuk menggalakkan koperasi.

Dalam jangka panjang koperasi ini harus menjadi soko guru ekonomi nasional kita.

Namun, dengan tetap memandang pada arah jangka panjang dan cita-cita besar, kita juga harus bersikap realistis. Cita-cita besar tidak pernah akan terwujud dengan semboyan atau slogan. Cita-cita besar hanya akan terwujud melalui perjuangan. Demikian pula, dalam menegakkan koperasi kita pun harus realistis, harus berani melihat kenyataan.

Ketika kita menegakkan Orde Baru perekonomian kita dalam keadaan lumpuh. Sebagian besar rakyat dalam keadaan serta kekurangan dan boleh dikatakan tidak memiliki kemampuan ekonomi.

Keadaan koperasi sangat menyedihkan, bukan saja kemampuan rakyat untuk mendirikan koperasi tidak ada, tetapi juga situasi ekonomi yang dilanda inflasi, serta kemacetan produksi waktu itu, jelas bukan merupakan keadaan yang dapat mendorong pertumbuhan koperasi.

Persoalan pokok kita waktu itu adalah bagaimana kita dapat membebaskan diri dari lumpur kemerosotan, bagaimana kita dapat segera memenuhi kebutuhan rakyat yang paling mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda lagi, dan bagaimana kita membenahi diri agar dapat mulai melaksanakan pembangunan.

Karena itu, setelah kita melampaui saat yang sulit dari kemelut politik sebagai akibat pemberontakan G-30-S/PKI, maka pada tahun '67 sampai '69, kita melancarkan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Setelah keadaan ekonomi kita memadai, maka sejak tahun '69 kita mulai melaksanakan REPELITA I.

Dalam melaksanakan pembangunan itu di samping kita mulai membina dan menumbuhkan koperasi dengan menghimpun kemampuan rakyat yang ada, kita memberi kesempatan kepada

kekuatan ekonomi sektor negara dan sektor swasta yang memiliki kemampuan untuk ikut mengambil peranan dalam usaha stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, serta ikut memutar roda pembangunan.

Kita juga membuka diri terhadap penanaman modal asing dan mendorong penanaman modal dalam negeri, untuk mempermudah pelaksanaan program-program pembangunan, karena kita memang memerlukan modal dan ketrampilan yang belum kita miliki.

Hasil-hasil dari kebijaksanaan ini jelas telah kita rasakan, seperti yang tadi telah saya uraikan berupa hasil-hasil pembangunan yang mengesankan.

Namun saya tegaskan di sini, bahwa sejak semula Pemerintah tidak akan membiarkan sektor swasta ini tumbuh tanpa arah. Pemerintah tidak membiarkan berkembang biaknya suasana liberal. Pemerintah tetap memegang kendali, memberi arah kepada perkembangan sektor swasta agar kemakmuran rakyat, kemakmuran bersama lah yang diutamakan. Jika Pasal 33 Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, maka penguasaan ini tidak harus berarti penguasaan secara langsung dengan pemilikan dan pengelolaan oleh negara sendiri. Penguasaan ini dapat dilakukan melalui pengarahan-pengarahan menuju terwujudnya kesejahteraan umum, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang digariskan.

Seperti beberapa kali saya tegaskan dalam berbagai kesempatan, kita tidak akan meluncur ke arah liberalisme ekonomi, yang akan menciptakan kekuatan-kekuatan ekonomi yang kapitalistis.

Sekarang, setelah ekonomi kita memiliki daya tahan yang lumayan dan setelah pembangunan kita mulai menunjukkan hasil yang berarti dalam meningkatkan pendapatan rakyat kecil, maka tampaklah kegairahan dan perkembangan kehidupan koperasi di mana-mana, baik Koperasi Unit Desa yang dewasa ini sedang kita gerakkan, maupun koperasi fungsional lainnya seperti Koperasi Wanita, Koperasi Pemuda, Koperasi Karyawan, Koperasi Buruh dan seterusnya.

Dalam rangka menumbuhkan koperasi ini, prioritas kita berikan kepada koperasi-koperasi primer, khususnya Koperasi Unit Desa. Ini berarti kita menumbuhkan koperasi itu dari akar-akarnya, dari desa-desa, karena di sanalah tinggal sebagian besar rakyat kita yang lemah kemampuan ekonomi dan permodalannya. Juga karena pada masyarakat di desa-desa itulah terdapat semangat kekeluargaan, semangat kegotongroyongannya yang kuat, semangat yang mutlak diperlukan untuk pengembangan dan kehidupan koperasi.

Dalam pada itu, satu hal yang perlu kita perhatikan dalam membina dan menumbuhkan kehidupan perkoperasian adalah bahwa koperasi pertama-tama harus merupakan gerakan dari masyarakat sendiri! Untuk itu harus di bangkitkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat bahwa melalui koperasi sebagai wadah usaha bersama, usaha mereka dapat lebih cepat maju dan penghasilan mereka dapat lebih meningkat, atau apabila membutuhkan sesuatu dapat memperolehnya lebih mudah dan murah, sehingga mereka dapat merasakan kehidupan yang lebih baik dan lebih terjamin. Dengan perkataan lain, mereka dapat benar-benar merasakan manfaat dari koperasi dan manfaat dari menjadi anggota koperasi.

Di sinilah pentingnya peranan para pembimbing, pembina dan penyuluh koperasi, demikian juga aparat pemerintah yang erat hubungannya dengan pembinaan koperasi di seluruh pelosok Tanah Air. Dalam rangka ini maka dalam hal pembinaan KUD, maka di samping adanya pengurus koperasi, yang dipilih dari antara anggota-anggota koperasi sendiri, tetap diperlukan kelompok penasehat dan pembimbing yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat desa dan tenaga-tenaga penyuluh yang ada. Kelompok inilah yang dihimpun dalam BUUD.

Mereka bukan saja harus dapat memberikan penerangan mengenai pentingnya koperasi, memberikan bimbingan teknis dan meningkatkan ketrampilan teknis kehidupan usaha koperasi, tetapi juga harus benar-benar menghayati fungsi hakiki koperasi ialah untuk membantu dan melayani anggota-anggota koperasi, yang tidak lain adalah para golongan ekonomi lemah.

Koperasi harus benar-benar mempunyai kekuatan hidup sebagai badan usaha yang dapat tetap tegak dalam jaman kemajuan, yang dapat tumbuh terus dalam dinamikanya ekonomi moderen, bersama-sama dengan badan usaha negara maupun swasta.

Untuk itu koperasi harus benar-benar ditumbuhkan menjadi organisasi ekonomi yang mampu menghadapi perkembangan kemajuan ekonomi dan pembangunan.

Untuk menjawab tantangan itu, tidak dapat lain, koperasi harus dikelola dengan baik dengan memperhatikan hukum-hukum ekonomi yang rasional. Masalah-masalah ketatalaksanaan, keuangan, produksi, pengolahan, pemasaran dan lain sebagainya perlu terus ditingkatkan pengelolaannya. Untuk itulah diperlukan latihan-latihan dan pendidikan, diperlukan manager-manager koperasi dengan dedikasi yang tinggi dan ketrampilan yang memadai. Dan untuk itu dewasa ini Pemerintah sedang merencanakan

tenaga-tenaga manager koperasi, yang kalau perlu diangkat sebagai pegawai negeri yang diperbantukan kepada koperasi-koperasi untuk melaksanakan pengelolaan koperasi sebaik-baiknya. Karena mereka diperbantukan kepada koperasi, maka mereka tunduk dan bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Sebagai perangsang agar mereka benar-benar bekerja dengan baik untuk koperasi, maka mereka dimungkinkan memperoleh imbalan jasa dari koperasi sesuai dengan kemampuan koperasi dan sesuai pula dengan hasil kemajuan yang dicapai oleh koperasi berkat jerih payah para managernya.

Masih terbentang luas lapangan usaha yang dapat ditangani oleh koperasi, seperti pertanian, kerajinan rakyat, industri kecil, perikanan, pelayaran rakyat, angkutan di daerah perkotaan dan pedesaan, listrik desa dan banyak lainnya lagi. Di samping itu berjuta-juta petani kecil, nelayan, pengrajin-pengrajin, pedagang-pedagang kecil, bengkel-bengkel kecil dan banyak usaha "orang-orang kecil" lainnya, sebenarnya apabila dapat dihimpun dalam usaha-usaha bersama yang berbentuk koperasi dan melalui koperasi dapat dilayani kebutuhannya untuk meningkatkan produksi dan pemasarannya maka akan dapat menjadi kekuatan ekonomi nasional yang tangguh dan akan memperkokoh ketahanan nasional kita.

Itulah tantangan koperasi kita!

Koperasi merupakan wadah yang paling tepat untuk mengangkat kemampuan yang lemah, sehingga pemerataan dan keadilan dapat makin kita wujudkan. Pemerintah dengan sungguh-sungguh telah membina KUD, yang secara berangsur-angsur telah dapat berkembang menjadi wadah bersama kaum tani. Dengan sadar kita memulai menumbuhkan koperasi ini di desa-desa,

karena seperti telah disinggung tadi, justru di desa inilah tinggal bagian terbesar rakyat kita yang lemah ekonominya.

Cita-cita kita mengenai kemajuan, kesejahteraan dan keadilan social akan dapat terwujud dengan cepat, apabila di beribu-ribu desa telah berdiri KUD-KUD yang benar-benar tangguh, yang mampu memberikan peranan dalam kehidupan ekonomi di desa-desa dan pada saatnya juga secara nasional. Karena itu pembentukan koperasi-koperasi di desa-desa justru menegaskan ketetapan hati kita untuk membangun dari bawah. Jika pada permulaan KUD itu memusatkan kegiatannya pada lapangan pertanian, maka sejalan dengan kemampuannya yang meningkat, ia harus tumbuh menjadi koperasi yang akan menangani semua kegiatan ekonomi dan kebutuhan pedesaan. Dan jika semua warga desa telah menjadi anggota Koperasi Unit Desa, dengan kesadaran akan manfaat dari jasa koperasi itu, maka koperasi benar-benar akan menjadi kekuatan ekonomi nasional yang besar dan dapat diandalkan.

Di samping menggerakkan pembentukan KUD, maka kita juga harus menumbuhkan koperasi-koperasi fungsional di lingkungan sekitar kita, di tempat-tempat bekerja, di kantor-kantor swasta maupun Pemerintah, di sekolah-sekolah sampai perguruan-perguruan tinggi, yang memungkinkan pembentukan koperasi. Pendek kata, koperasi harus kita jadikan sebagai bagian hidup kita. Khususnya bagi mereka yang merasa dirinya lemah ekonominya, berhimpunlah dan bentuklah koperasi.

Jika koperasi nanti telah tumbuh kuat dan telah meningkat kemampuan keuangannya, maka koperasi akan kita dorong untuk membeli saham-saham perusahaan swasta, sehingga koperasi-koperasi ikut memiliki perusahaan swasta. Kepada para pengusaha swasta --terutama perusahaan yang tergolong besar--

saya anjurkan agar mulai mengadakan langkah-langkah untuk memberikan kesempatan kepada koperasi --termasuk koperasi dari organisasi buruh yang bersangkutan-- dalam pemilikan saham perusahaan. Demikian juga agar ditingkatkan kerjasama dan pemberian bimbingan teknis oleh perusahaan-perusahaan besar kepada koperasi-koperasi dalam kegiatan ekonomi, baik dalam proses produksi, pengolahan maupun pemasarannya, untuk memperlancar dan mempercepat peningkatan kemampuan koperasi-koperasi yang bersangkutan.

Sekali lagi, koperasi merupakan panggilan dan tantangan bagi kita semua untuk mewujudkan demokrasi ekonomi seperti yang ditunjukkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar.

Makin berkembangnya kemampuan koperasi akan merupakan tanda penting dari tumbuhnya demokrasi ekonomi di Indonesia dan dengan demikian juga makin nyata hasil-hasil kita dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saudara Ketua dan Sidang Dewan yang terhormat;

Di samping hasil gemilang di bidang pertanian --terutama produksi beras-- dan bertambah besarnya kegiatan KUD-KUD seperti yang saya kemukakan tadi, kita tetap menghadapi tantangan besar, khususnya bagi para petani di Pulau Jawa.

Tantangan ini tampak jelas jika kita teliti jumlah rumah tangga bangsa kita yang mengusahakan tanah pertanian dibanding dengan luas tanah yang mereka garap. Berdasar hasil sensus penduduk tahun '80 yang lalu, lebih dari 11 juta rumah tangga yang masing-masing mengusahakan tanah pertanian yang lebih kecil dari ½ hektar. Dari jumlah tadi hampir 6 juta rumah tangga mengusahakan tanah pertanian yang masing-masing lebih kecil dari ¼ hektar.

Tanah-tanah sempit yang mereka usahakan itu ada yang merupakan tanah milik sendiri dan ada pula yang merupakan milik orang lain. Sebagian besar dari mereka ini tinggal di Pulau Jawa yang makin terasa berdesak-desak.

Menurut perhitungan, mengerjakan tanah pertanian di bawah $\frac{1}{2}$ hektar adalah tidak ekonomis lagi, tidak mencukupi kebutuhan.

Di tahun-tahun yang akan datang dapat kita pastikan bahwa tanah yang mereka garap akan lebih kecil lagi, antara lain karena adat masyarakat kita yang akan mewariskan tanah itu kepada anak-anaknya.

Kenyataan ini lah yang melahirkan apa yang belakangan ini sering disebut orang sebagai “petani gurem”. Tumbuhnya “petani gurem” ini merupakan bahagian dari proses pertumbuhan penduduk kita, yang terus bertambah besar, walaupun pertambahannya telah dapat ditahan dengan makin berhasilnya program Keluarga Berencana. Yang pasti, lahirnya “petani gurem” ini bukan merupakan hasil pembangunan, melainkan karena bertambahnya penduduk tadi, sedangkan luas tanah tidak bertambah, malahan dipecah-pecah melalui pewarisan.

Jawaban yang harus kita berikan adalah perluasan kesempatan kerja dan bersamaan dengan itu gerakan transmigrasi besar-besaran ke tanah-tanah luas di luar Pulau Jawa. Di samping itu perlu kita pertimbangkan suatu cara untuk mencegah pembagian/pemecahan pemilikan tanah petani menjadi kurang dari $\frac{1}{2}$ hektar, yang disebabkan oleh pewarisan ataupun tindakan hukum lainnya.

Karena itu lah tantangan besar kita di tahun-tahun yang akan datang adalah keberhasilan gerakan transmigrasi ini, baik yang ditangani oleh Pemerintah maupun transmigrasi spontan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, yang terus kita dorong dengan

mengembangkan daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan bertambah lancarnya sarana perhubungan.

Gerakan transmigrasi ini jelas meminta biaya yang sangat besar, terutama untuk membuka dan mempersiapkan tanah-tanah pemukiman dan tanah pertanian baru, yang hanya mungkin kita pikul jika pembangunan terus kita tingkatkan. Selama REPELITA III sampai sekarang, kita memang mengalami kemajuan yang pesat dalam pelaksanaan program transmigrasi ini, yang antara lain telah kita lakukan dengan membangun "jembatan udara" dari Jawa ke daerah-daerah dekat pemukiman baru di luar Jawa. Sejak pelaksanaan REPELITA III sampai saat ini lebih dari 125 ribu kepala keluarga yang telah kita transmigrasikan. Ini merupakan kemajuan yang sangat besar, sebab selama REPELITA II dahulu kita baru dapat mentransmigrasikan tidak lebih dari 60 ribu kepala keluarga. Ini berarti bahwa dalam jangka waktu kurang dari 2½ tahun kita dapat mentransmigrasikan keluarga lebih dari 2 kali jumlah yang dapat kita lakukan dalam waktu 5 tahun sebelumnya.

Namun demikian, jumlah dan kecepatan yang harus kita transmigrasikan jelas harus lebih meningkat lagi, apabila kita ingin mencapai sasaran transmigrasi dalam REPELITA III, ialah 500 ribu kepala keluarga. Padahal berdasarkan angka sensus tadi jumlah penduduk yang perlu di transmigrasikan --para pemilik tanah kurang dari ½ ha-- jauh lebih besar lagi. Gambaran ini menyadarkan kita, betapa masalah dan tantangan pembangunan kita di masa datang sungguh tidak ringan.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Salah satu tantangan besar dalam pembangunan kita dalam arti yang seluas-luasnya adalah peningkatan pendidikan. Kita

selalu ingat akan pesan Pembukaan Undang-Undang Dasar, agar dalam alam Indonesia Merdeka kita terus berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu Undang-Undang Dasar juga menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan agar kita memajukan kebudayaan nasional. Jika kita berbicara mengenai soal pendidikan, maka perhatian yang besar kita curah kan pada pembinaan generasi muda.

Masalah pendidikan, pembinaan generasi muda dan pengembangan kebudayaan nasional berkisar pada beberapa masalah pokok, ialah : peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, pengembangan pendidikan yang mampu menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan bangsa, pengembangan generasi muda agar mampu menjadi penerus dan pembangun bangsa, pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional yang bersumber pada budaya bangsa sendiri.

Saya menyadari bahwa bangsa kita sekarang sedang haus-hausnya akan pendidikan. Kita merasakan luapan anak-anak dan remaja-remaja kita yang ingin memasuki semua tingkat pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai tingkatan pendidikan tinggi. Walaupun dari tahun ke tahun penyediaan tempat-tempat belajar selalu bertambah, namun kehausan pendidikan itu terasa belum terpenuhi juga. Ini lah yang menyebabkan perasaan gelisah pada anak-anak kita, dan juga pada orang tua, terutama pada setiap kali memasuki tahun ajaran baru. Kita telah banyak berbuat, namun kebutuhan kita masih lebih banyak lagi. Dan ini lah salah satu tantangan besar kita.

Dalam tahun kedua REPELITA III yang baru lalu, pada tingkat sekolah dasar kita telah dapat menampung lebih dari 25,5 juta orang anak, yang berarti 1,4 juta orang anak lebih banyak dari yang bersekolah dasar pada tahun sebelumnya. Dengan jumlah

tadi, maka pada saat ini tinggal 1 diantara 10 orang anak kita yang belum tertampung di sekolah dasar. Bertambah besarnya anak-anak yang dapat bersekolah tadi berkat keberhasilan kita dalam membangun puluhan ribu gedung sekolah baru, memperbaiki yang sudah ada dan menambah kelas baru. Juga telah diangkat puluhan ribu guru-guru baru. Dapat kita bayang kan betapa besar masalah pendidikan yang harus kita tangani itu.

Dalam tahun kedua REPELITA III itu kita juga dapat menaikkan jumlah anak-anak yang masuk ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan lebih dari 20% dan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lebih dari 19% jika dibanding dengan tahun sebelumnya, sehingga lebih dari 3,4 juta anak-anak tertampung di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan lebih dari 1,7 juta anak untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Di tingkat pendidikan tinggi ada kenaikan daya tampung 28% lebih dalam tahun kedua REPELITA III jika dibanding dengan tahun sebelumnya, sehingga, saat ini jumlah mahasiswa kita di perguruan tinggi negeri maupun swasta berjumlah sekitar 454 ribu orang.

Segala langkah memperbanyak sarana pendidikan tadi terus diikuti oleh peningkatan mutu pada semua tingkatan, juga pada sekolah-sekolah kejuruan yang makin banyak kita perlukan dalam era pembangunan sekarang dan seterusnya.

Di bidang kebudayaan, terasa makin besarnya perhatian pada kebudayaan nasional, juga kebudayaan daerah yang ikut memberi warna warni yang indah kepada kebudayaan nasional kita.

Pembinaan bangsa dan pembangunan negara kita juga meliputi kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga sebagai bagian dari usaha kita untuk membangun manusia Indonesia yang utuh.

Karena itu saya menganggap penting usaha Pemerintah bersama masyarakat dan semua keluarga untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolah ragakan masyarakat, sehingga akan berkembang lah suatu gerakan keolahraagaan nasional.

Seperti tadi saya kemukakan, pembangunan dalam arti luaslah yang sedang kita kerjakan. Ini berarti pembangunan sosial yang mencakup semua segi. Dalam rangka ini lah Rita tidak mengabaikan Saudara-saudara kita yang cacat. Dari mimbar ini, saya menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat kita, terutama dalam mengisi Tahun Cacat Internasional tahun '81 ini, untuk lebih banyak memberi perhatian pada para cacat. Dalam hal ini sumbangan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sekolah-sekolah luar biasa akan sangat bermanfaat bagi anak-anak cacat yang memang memerlukan pendidikan secara khusus itu.

Pembangunan terus memerlukan rangsangan-rangsangan baru, kegairahan baru dan kesegaran. Dalam rangka ini besar sekali peranan alat-alat media massa, terutama pers, radio dan televisi.

Kita semua merasa gembira, bahwa pers nasional kita telah dapat mengembangkan kebebasan dan tanggung jawab secara serasi. Di sini saya tegaskan, bahwa kita tidak ingin memiliki pers yang bungkem seribu bahasa terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Yang kita perlukan dalam pers pembangunan adalah berita dan ulasan yang seimbang, jujur dan bertanggung jawab, sehingga dengan menyadari kekurangan-kekurangan tadi kita tetap tidak kehilangan kepercayaan terhadap masa depan. Dalam menghadapi persiapan pemilihan umum yang akan datang, dimana kita akan mengalami peningkatan kegiatan politik dan kampanye, hendaknya pers dapat menempatkan diri dan mengendalikan diri agar pemberitaan-pemberitaannya tidak akan membakar-bakar

keadaan, yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap stabilitas dan persatuan.

Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia juga telah makin dapat memainkan peranan sebagai penyebar semangat pembangunan. Sejak dihapuskannya iklan dari siaran Televisi Republik Indonesia dan diganti kan waktu yang ada bagi siaran yang berguna bagi masyarakat yang sedang membangun, maka penerangan pembangunan telah makin merasuk ke dalam masyarakat kita. Hampir setiap malam kita dapat mengetahui dan merasakan bahwa pembangunan ini benar-benar menyebar ke setiap penjuru Tanah Air, bahwa kegiatan pembangunan yang besar maupun yang kecil terus bergerak di mana-mana, sampai ke pelosok-pelosok desa yang terpencil sekali pun. Kita juga makin mengenal Tanah Air kita yang luas ini, dengan segala adat istiadat, segala keindahan dan kekayaan alam, segala kegiatan dan kegairahannya, sehingga makin dekat lah rasa persatuan kita.

Persatuan untuk membangun, dan membangun untuk memperkokoh persatuan ini lah yang harus menjadi semboyan kita semua!

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Kendatipun kita sibuk dengan melaksanakan pembangunan namun kita tidak boleh lengah terhadap hambatan, gangguan, ancaman ataupun bahaya yang datang dari dalam maupun dari luar.

Dewasa ini kita hidup dalam dunia yang penuh gejolak. Berbagai perang yang tidak diumumkan telah ber letusan di mana-mana. Pasukan asing memasuki wilayah negara lain dan menimbulkan kebinasaan di kalangan rakyat. Kita tegas menentang segala bentuk agresi itu, siapa pun yang melakukannya. Bersama semua

bangsa yang cinta damai kita mengajak semua pihak agar mengambil langkah yang sesuai dengan peradaban dan perikemanusiaan.

Kita memang bangsa yang mencintai perdamaian. Namun kemerdekaan bagi kita adalah di atas segala-galanya. Bagi kita Kemerdekaan adalah masalah hidup atau mati. Dalam dunia yang penuh pergolakan itu, siapa yang ingin memelihara kemerdekaannya, ia harus siap mengangkat senjata untuk memelihara kemerdekaannya. Kemerdekaan adalah milik nasional yang tidak dapat kita percayakan kepada siapapun untuk mempertahankannya. Kemerdekaan adalah kehormatan; dan hak serta kewajiban kita sendiri untuk mempertahankannya.

Kekuatan terpokok kita untuk mempertahankan kemerdekaan nasional itu ialah persatuan dan kesatuan kita sendiri, khususnya persatuan dan kesatuan antara rakyat dan ABRI. Rakyat adalah kekuatan dasar pertahanan dan keamanan kita, sedangkan ABRI adalah kekuatan inti untuk menangkal ancaman dan bahaya terhadap keselamatan bangsa dan kedaulatan negara ini. Semuanya itu merupakan pelaksanaan dari sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, yang merupakan pilihan tepat untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan nasional kita.

Pembinaan dan pembangunan Angkatan Bersenjata tertuju pada pelaksanaan sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang demikian tadi itu.

Karena ABRI tumbuh dengan kekuatan sendiri dari kancah Perang Kemerdekaan dahulu, maka unsur kepercayaan pada diri sendiri ini ditanamkan kuat-kuat dalam hati setiap prajurit. Ini berarti pembinaan ABRI pertama-tama ditekankan pada unsur manusianya. Untuk itu dewasa ini sedang diadakan penyempurnaan secara menyeluruh pada semua lembaga pendidikan ABRI, agar secara mental dan fisik dapat menjadi prajurit pejuang yang

tangguh. Dalam pada itu, sesuai dengan tuntutan jaman, persenjataan dan peralatan ABRI terus diperbaiki dan dimoderenkan sesuai dengan kemajuan teknologi. Angkatan Darat misalnya telah memiliki tank-tank baru, Angkatan Laut terus bertambah kapal-kapal perangnya baik yang di atas maupun di dalam laut sehingga bertambah kuat lah armada kita, Angkatan Udara juga terus melebarkan sayapnya dengan beberapa skwadron baru baik untuk tempur maupun untuk angkutan, Polri juga terus diperlengkapi dengan peralatan dan sarana-sarana yang diperlukan di samping perbaikan-perbaikan cara kerja sehingga dapat menjadi polisinya rakyat dalam negara yang merdeka. Di wilayah-wilayah dibangun pangkalan-pangkalan baru, dan asrama-asrama prajurit yang dapat membuat keluarganya lebih sejahtera. Di berbagai tempat dibangun pangkalan-pangkalan angkatan udara baru, sehingga mampu menjaga pintu-pintu masuk Tanah Air kita yang luas ini dari berbagai penjuru.

ABRI juga meningkatkan diri, dengan jalan memperkuat kemandirian ABRI dan rakyat; antara lain dengan gerakan ABRI masuk desa, penyuluhan wajib bela negara, penertiban-penertiban dalam tubuh ABRI dan lain-lain usaha agar ABRI benar-benar terasa dekat di hati rakyat dan menjadi milik rakyat.

Dengan kesiapsiagaan ABRI, dengan kemandirian ABRI dan rakyat, maka secara nasional situasi keamanan kita dewasa ini sangat mantap.

Namun, kita merasa prihatin atas meningkatnya kejahatan dan perbuatan-perbuatan keji lainnya yang dilakukan dengan kekerasan dan di luar batas-batas perikemanusiaan. Gejala ini tidak boleh kita biarkan berlarut-larut. Dunia memang sedang dilanda tingkah-tingkah kekerasan. Namun itu tidak boleh menjadi penyakit masyarakat kita. Karena itu kita perlu terus menerus

meningkatkan ketangguhan mental dan akhlak dengan bimbingan ajaran agama kita masing-masing dan mempertebal penghayatan terhadap Pancasila. Tindak-tandak kekerasan sungguh merupakan noda dalam masyarakat kita yang mewarisi nilai-nilai keluhuran budi dan semangat kekeluargaan. Karena itu harus ada tindakan untuk menghentikannya. Kepada alat keamanan dan alat penegak hukum diminta untuk meningkatkan kesigapannya dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan dan pelanggar hukum itu.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Sementara kita terus membenahi diri ke dalam; kita tetap menyadari tugas-tugas internasional kita.

Ciri utama politik luar negeri kita dalam memasuki jaman pembangunan ini ialah mengabdikan politik luar negeri yang bebas aktif kepada kepentingan nasional, terutama untuk pembangunan di segala bidang. Dan memang, pelaksanaan politik luar negeri yang demikian itu telah memberi manfaat terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan kita.

Pelaksanaan politik luar negeri yang kita abdikan kepada pembangunan itu sesuai dengan kebutuhan jaman, memang lebih realistic, karena jaman sekarang dan seterusnya memang merupakan jaman pembangunan bangsa-bangsa.

Tentu saja, dalam melaksanakan politik luar negeri yang demikian tadi, kita bertekad untuk selalu menampakkan wajah kita sebagai negara Pancasila, yang mempunyai pendekatan sendiri dalam memecahkan masalah-masalah luar negeri. Dengan jalan damai, melalui musyawarah dan tidak perlu dengan cara-cara yang radikal atau ekstrim.

Sikap itu mencerminkan kepribadian kita ke luar. Sikap ber kepribadian ini bertambah penting, sebab dunia penuh dengan pergolakan dan tarikan-tarikan dari kekuatan-kekuatan besar.

Terhadap masalah Timur Tengah sikap kita selalu jelas sejak semula, ialah berdiri di pihak bangsa-bangsa Arab dan rakyat Palestine yang memperjuangkan hak-haknya yang adil dalam melawan keangkuhan agresi Israel. Kita mengutuk politik perbedaan warna kulit yang dijalankan dengan angkuh oleh rezim di Afrika Selatan, yang merendahkan martabat manusia itu. Perkembangan di Afghanistan tetap memprihatinkan kita, karena intervensi militer asing yang mendapat kecaman pendapat umum dunia. Demikian juga kita prihatin dengan perang Irak — Iran yang belum terselesaikan itu. Samudera Hindia yang berbatasan dengan wilayah kita, mulai menjadi medan pameran kekuatan antara negara-negara besar dunia, sehingga kita perlu meningkatkan kewaspadaan.

Sementara itu masalah Kampuchea tetap berkepanjangan, yang apabila dibiarkan berlarut, dapat mengganggu stabilitas wilayah di sekitar kita pada umumnya.

Kita jelas tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri rakyat Kampuchea, kita tidak mempunyai kepentingan untuk terlibat langsung di dalam pergolakan yang sudah rumit di sana. Yang kita lakukan adalah mencari jalan keluar secara aktif, melalui penyelesaian politik, ialah dengan mengadakan konperensi internasional seperti yang telah ditunjukkan oleh Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan baru-baru ini telah berlangsung.

Kita ingin melihat Kampuchea yang hidup sebagai negara yang berdaulat dan damai.

Dengan Kampuchea yang berdaulat dan damai, maka akan bertambah mantap perdamaian di sekitar kawasan kita ini. Dengan

demikian, kita secara bersama-sama dapat melaksanakan tugas besar, memenuhi tuntutan sejarah kemanusiaan dewasa ini, ialah tugas perjuangan bersama untuk membangun tata ekonomi dunia yang lebih memberi keadilan, yang menjamin kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Perjuangan membangun Tata Ekonomi Dunia Baru itu masih akan berjalan lama.

Sebagai salah satu pendukung utama pembangunan Tata Ekonomi Dunia Baru kita telah mengambil berbagai langkah nyata, yang terpenting di antaranya ialah kita telah terus mengembangkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara yang sedang berkembang dan mengembangkan kerjasama teknik di antara negara-negara yang sedang berkembang.

Kita juga merasa puas atas bertambah eratnya tali persaudaraan dan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN, yang makin hari makin mampu memainkan peranan dalam berbagai percaturan internasional. Kita juga merasa berbahagia dapat memberi sumbangan bagi pemeliharaan perdamaian dan pengembangan kerjasama untuk tujuan-tujuan yang baik dalam rangka Gerakan Non Blok, Konperensi Islam, Kelompok 77, Opec dan lain-lain organisasi antar bangsa.

Di samping hasil-hasil lain di lapangan politik dan ekonomi, maka salah satu hasil penting dari pelaksanaan politik luar negeri kita adalah diakuinya konsepsi Wawasan Nusantara kita oleh sejumlah negara-negara di dunia. Ini merupakan langkah yang kita ambil untuk memantapkan wujud Negara Kesatuan yang berbentuk kepulauan yang luas ini. Sebagai pelengkap asas Negara Nusantara ini kita terus berjuang bersama-sama negara-negara lain memperbaharui rezim hukum laut internasional tentang zone ekonomi eksklusif, yang kini telah dikembangkan oleh masyarakat

internasional melalui Konferensi PBB mengenai Hukum Laut. Dewasa ini Pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia yang jika telah tiba saatnya nanti akan saya ajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Demikian lah, saya telah mengajak kita semua untuk melihat keadaan dan tempat kita sekarang dalam kerangka dan ukuran-ukuran sejarah.

Di masa lampau tantangan-tantangan nasional kita sungguh besar : baik di lapangan politik, ekonomi maupun sosial. Kita telah bekerja keras dan juga ber korban. Tidak sedikit masalah-masalah besar yang telah kita tangani dan sekarang kita mulai merasakan hasil buahnya. Namun kita tetap sadar bahwa tantangan dan tuntutan di hadapan kita lebih besar lagi di masa datang. Untuk itu kita akan terus bekerja keras dan berani mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan. Yang salah marilah kita perbaiki, yang menyimpang kita luruskan, bahkan yang sudah baik perlu kita usahakan agar menjadi lebih baik lagi.

Pembaharuan itu memang kita perlukan sebab pembangunan memang memerlukan pembaharuan. Pembaharuan ini juga kita perlukan untuk menyongsong tampil nya generasi baru dan zaman baru. Generasi lama, Generasi '45, makin mendekati masa surut. Pembinaan generasi muda ini mendapat perhatian yang besar dari Pemerintah dan untuk itu kita telah memiliki garis kebijaksanaan nasional. Lebih dari itu, pembinaan dan pengembangan generasi muda adalah tanggung jawab semua generasi, yang tua maupun yang muda itu sendiri. Generasi muda sebagai

pemilik dan pembangun masa depan Indonesia yang Jaya perlu dilengkapi dengan ketrampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani dan rokhani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian dan budi pekerti luhur.

Bagi generasi yang lebih tua, maka tugas sejarah yang teramat mulia ialah membuka jalan bagi generasi yang lebih muda agar dapat hidup lebih baik dari apa yang dapat dicapai sampai sekarang.

Untuk itu tugas terpokok kita adalah melanjutkan pembangunan politik, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial yang makin mantap dalam negara yang berdasarkan Pancasila ini.

Karena itu saya ingin mengulangi yang saya katakan lebih dari satu tahun yang lalu, bahwa tugas penting kita dalam dasawarsa '80-an ini adalah terus menumbuhkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dengan tumbuhnya secara serasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu maka sekaligus akan tercapai ketahanan nasional kita, yang merupakan unsur penting bagi bangsa kita yang sedang tumbuh dan juga penting dalam menghadapi dunia yang terus berubah.

Seperti yang saya gambar kan tadi, pembangunan kita di segala bidang sampai saat ini, menunjukkan dengan jelas arah pertumbuhan yang makin mantap dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu.

Pembangunan kita tidak salah arah, karena kita bertekad untuk setia kepada cita-cita semula, cita-cita Proklamasi, cita-cita masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45.

Sekali lagi, mungkin saja banyak yang belum sempurna, mungkin ada yang kita rasakan janggal. Akan tetapi semuanya itu merupakan bagian yang memang harus kita benahi dalam pem-

bangunan raksasa dalam negara besar seperti Indonesia ini.

Karena itu marilah kita maju terus dan bekerja bahu membahu, dalam suasana kekeluargaan dan persatuan nasional.

Marilah kita terus membangun masa depan demi kebahagiaan kita bersama dalam negara Pancasila yang kokoh dan Jaya!

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua.

Terima kasih.

Jakarta, 15 Agustus 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O